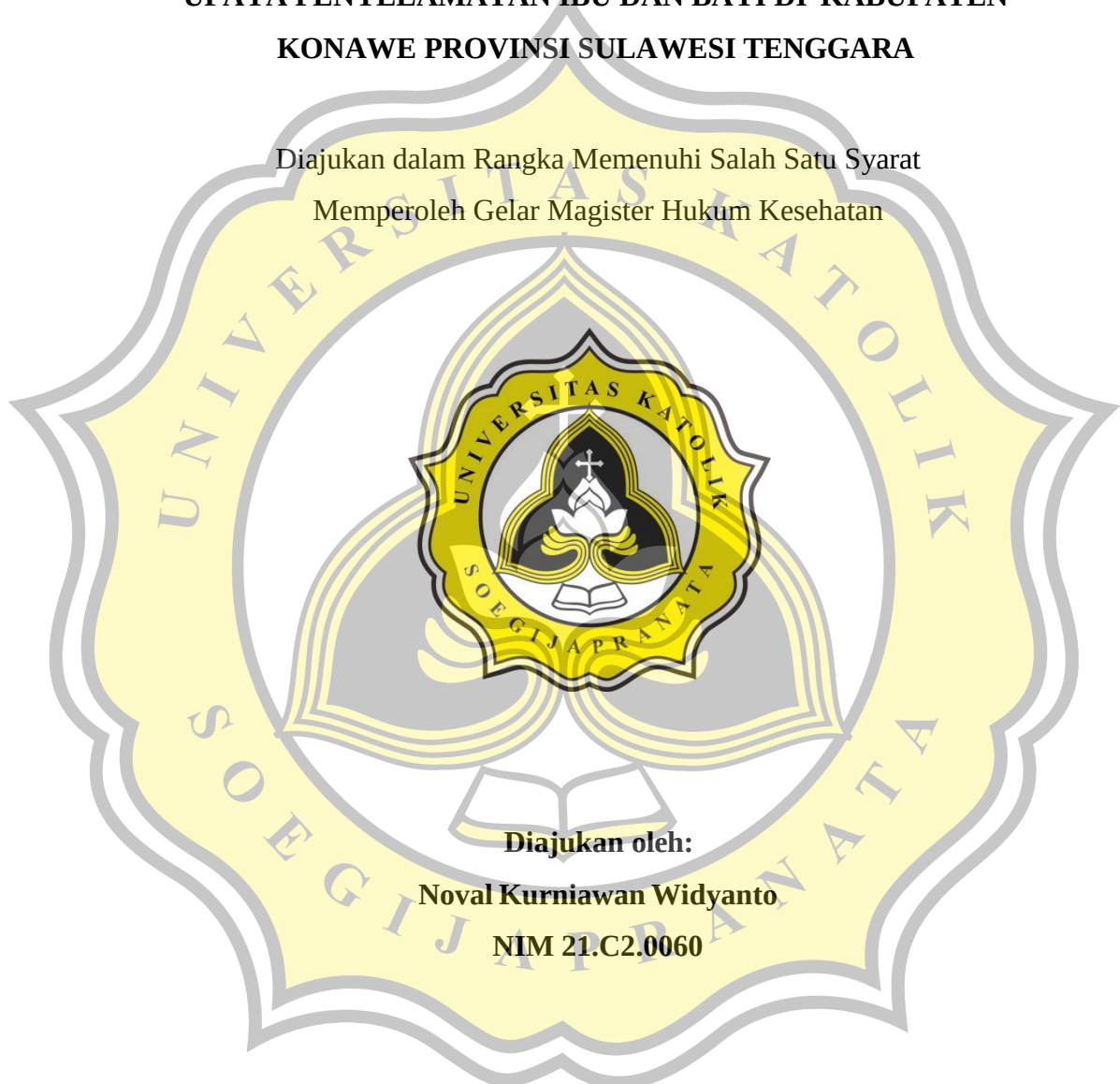


**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN PONED PUSKESMAS DALAM  
PELAKSANAAN RUJUKAN MEDIS KE RUMAH SAKIT SEBAGAI  
UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN  
KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Kesehatan



**Diajukan oleh:**

**Noval Kurniawan Widyanto**

**NIM 21.C2.0060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN PONED PUSKESMAS DALAM  
PELAKSANAAN RUJUKAN MEDIS KE RUMAH SAKIT SEBAGAI  
UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN  
KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

**Noval Kurniawan Widyanto**

**NIM 21.C2.0060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta terjadinya kasus kematian maternal pada proses rujukan di Puskesmas PONED Abuki dan Unaaha menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab bidan dalam pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bidan PONED dalam proses referral maternal–neonatal serta bagaimana kesesuaiannya dengan standar profesi dan ketentuan Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum bidan berdasarkan unsur kesalahan, kausalitas, dan kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif–empiris dengan pendekatan perundang–undangan, konseptual, dan kasus melalui wawancara serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bidan pada kedua puskesmas secara umum telah sesuai standar profesi dan SOP rujukan, namun masih terdapat kendala sistemik seperti keterbatasan transport dan faktor keterlambatan rujukan yang memengaruhi outcome klinis. Gap analisis menunjukkan bahwa evaluasi tanggung jawab tidak dapat semata-mata dibebankan pada individu bidan tanpa mempertimbangkan faktor struktural pelayanan. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum bidan harus dinilai secara komprehensif berdasarkan standar profesi dan sistem rujukan. Disarankan penguatan sarana rujukan, peningkatan kompetensi, dan pengawasan implementasi regulasi untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, bidan PONED, rujukan medis, ibu dan bayi

## ABSTRACT

*The high maternal and infant mortality rates and the occurrence of maternal deaths during the referral process at Abuki Poned Health Center and Unaaha raise legal issues concerning midwives' liability in emergency obstetric and neonatal services. This study examines the legal responsibility of Poned midwives in maternal–neonatal referrals and its compliance with professional standards and Minister of Health Regulation Number 16 of 2024 concerning the Individual Health Service Referral System. The research aims to analyze midwives' legal accountability based on the elements of fault, causality, and damage. This study employs a normative–empirical legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through interviews and document analysis. The findings indicate that the midwives' actions in both health centers generally complied with professional standards and referral procedures; however, systemic constraints such as limited transportation facilities and referral delays affected clinical outcomes. The analytical gap reveals that liability assessment cannot be imposed solely on individual midwives without considering structural healthcare system factors. In conclusion, midwives' legal responsibility must be assessed comprehensively based on professional standards and referral system regulations. It is recommended to strengthen referral facilities, enhance professional competence, and improve regulatory supervision to ensure maternal and neonatal safety.*

**Keywords:** legal responsibility, Poned midwives, medical rujukan, mothers and infants.